

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurrahman, 1984, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta

Djojosoekarto Agung, 2008, *Kinerja Otonomi Khusus Papua*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta

Hadikusuma. Hilman, 2013, *Antropologi Hukum Indonesia*, P.T Alumni, Bandung

Hammar Roberth K.R, 2008, *Perlindungan Hak-hak atas Tanah dalam Perspektif Tata Ruang Kota*, Erikson Triit Press, Manokwari-Papua Barat

Harsono Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta

Hosio Jusach Eddy, 2009, *Papua Barat Dalam Realitas Politik NKRI*, LaksBang, Yogyakarta.

Muhammad Bushar, 1985, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta

Mustari, Pide Suriyaman, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta

Soimin Soedharyo, 2004, *Status hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketza Adat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Sulastri Dewi, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, CV. Pustaka Setia, Bandung

Sumardjono Maria. S.W, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

-----, 2009, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta

-----, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan kuliah, Yogyakarta

-----, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta

Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Ter Haar, 2013, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta

Van R. Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Wulansari, Catharina Dewi , 2012, *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*, Refika Aditama Bandung

## **B. Tesis**

Liza Uspiani, “Kajian Yuridis Jual Beli tanah Ulayat Kaum yang belum bersertifikat dikecamatan kota baru Kabupaten Dharmasraya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2013

Ekatni Paruna, “Jual beli tanah adat antara masyarakat hukum adat Dayak Ma’anyan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah”, *Tesis*, Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

Undang\_Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria/ Ka. BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hak Komunal

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan



**Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Umum Di Kota Manokwari (Studi Kasus Tanah Bandara Rendani)**

SINCE IRIANI THEDY, Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

SK Bupati Manokwari Nomor 244 Tahun 2002 Tentang Hak Ulayat atas Hutan dan Pengaturan Kompensasi Pemakaiannya

**D. Internet**

Perlu Pemetaan Hak Ulayat Masyarakat Papua, <http://www.aldp-papua.com>, diakses tanggal 10 Maret 2013

Sengketa Bandara rendani berujung ke pengadilan, <http://www.papua.us.html>, diakses tanggal 07 April 2013